

Judul : Biaya Haji Naik Tinggi. DPR Usul Rp 50 Juta
Tanggal : Minggu, 29 Januari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Biaya Haji Naik Tinggi DPR Usul Rp 50 Juta

ANGGOTA Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf meminta pembiayaan haji disesuaikan dengan proporsi antara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dengan nilai manfaat perbandingannya ialah 70:30. Hal ini agar calon jemaah haji (calhaj) tahun 2023 tidak menanggung beban biaya yang terlalu tinggi.

Bukhori berharap, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyusun peta jalan yang tepat agar kenaikan biaya tidak dibebankan pada calon haji tahun ini saja.

Kenaikan Bipih semestinya dilakukan secara bertahap, dimulai dengan peningkatan setoran awal.

"BPKH juga harus mampu meningkatkan nilai manfaat hasil dari pengelolaan dana dari 5,3 juta jemaah haji kita yang senilai Rp 167 triliun itu," ucap politikus PKS ini.

Dia mengusulkan agar Bipih yang dibebankan pada calhaj pada tahun ini cukup berada di angka Rp 50 juta dan sisanya di-cover melalui dana optimalisasi haji.

Angka tersebut lebih rasional untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji ke depan. "Angka ini lebih terjangkau bagi calhaj dan tidak terlalu memberatkan," imbuhnya.

Anggota Komisi VIII DPR Abdul Wachid meminta negara hadir pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hal itu diperlukan untuk menekan biaya haji reguler yang terus merangkak naik. Apalagi calhaj mayoritas bukan berasal dari kalangan atas.

"Calhaj reguler itu 70 persen dari orang-orang tidak mampu. Kalau yang mampu biasanya haji plus atau Haji Furoda," ujarnya.

Wachid lantas membandingkan beban biaya haji yang dibayarkan oleh calhaj Malaysia. Di Malaysia biaya penyelenggaraan haji sebesar Rp 108 juta. Tapi beban setiap jemaah hanya Rp 30 juta. "Sisanya itu di-cover oleh negara atau dari dana Haji," ucap politikus Gerindra ini.

Wachid juga meminta adanya keterlibatan perusahaan negara, dalam hal ini Garuda Indonesia dan Angkasa Pura. BUMN tersebut bisa melakukannya melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Lebih lanjut Wachid mengusulkan agar Kemenkes mempunyai anggaran khusus untuk haji khususnya soal obat-obatan. Agar obat-obatan yang disiapkan mampu, bagus dan berkualitas. "Kalau perlu jangan generik," kata dia.

Tak lupa, Wachid juga meminta masing-masing lembaga atau kementerian ikut andil dalam membantu pelaksanaan ibadah haji, termasuk dalam mitigasi saat munculnya gejolak kurs dan harga bahan bakar pesawat.

Tanpa adanya persiapan, gejolak akan berujung pada kenaikan dana penyelenggaraan haji yang berimbas pada biaya yang harus dibayarkan para jemaah.

"Jadi masyarakat cemas dengan biaya haji yang muncul Rp 69 juta itu," tutupnya. ■ TIF